MUSYTARI
ISSN : 3025-9495

Neraca Manajemen, Ekonomi
Vol. 25 No. 1 Tahun 2025
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

EFEKTIVITAS DEMOKRASI DALAM MENGURANGI KETIMPANGAN DAN MENINGKATKAN PERTUMBUHAN EKONOMI

Cindy Sepira Anggraini[1], Ola Handika Putra[2], Anas Malik[3]
[1,2,3] Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Bandar Lampung, Lampung, Indonesia
Cindysepira@gmail.com, vanklin38@gmail.com, anasmalik@radenintan.ac.id

ABSTRACT

This abstract shows that the relationship between democracy, income inequality, and economic growth is complex and highly dependent on the quality of governance, fiscal policy, educational capacity, and national economic structure. Democracy is expected to encourage redistributive policies and the development of public bodies, as well as provide political stability, transparency, and positive economic growth. However, empirical research in Indonesia shows that improvements in the quality of democracy (Indonesian Democracy Index/IDI) are not always accompanied by a decrease in the inequality ratio (Gini Ratio) in all provinces. This suggests that procedural democracy is inadequate and must be replaced by effective redistributive mechanisms, such as social and educational reforms. Although the goal of decentralization is to strengthen local democracy, if it does not generate adequate financial resources, it will only worsen the situation. A healthy democracy, especially when combined with infrastructure development and investment, can significantly reduce inequality. Therefore, effective democracy requires strong governance capacity, redistributive policies, and a stable support system to achieve inclusive economic growth.

Keywords: Democracy, Economic Growth, Inequality, Redistributive Policy, Decentralization

ABSTRAK

Abstrak ini menunjukkan bahwa hubungan antara demokrasi, pendapatan ketimpangan, dan pertumbuhan ekonomi bersifat kompleks dan sangat bergantung pada kualitas pemerintahan, kebijakan fiskal, kapasitas pendidikan, dan struktur ekonomi nasional. Demokrasi diperkirakan akan mendorong kebijakan redistribusi dan pengembangan badan-badan publik, serta memberikan stabilitas politik, transparansi, dan pertumbuhan ekonomi yang positif. Namun, penelitian empiris di Indonesia menunjukkan bahwa peningkatan kualitas demokrasi (Indeks Demokrasi Indonesia/IDI) tidak selalu sejalan dengan penurunan rasio ketimpangan (Rasio Gini) di semua provinsi. Hal ini menunjukkan bahwa demokrasi prosedural tidak memadai dan harus digantikan dengan mekanisme redistribusi yang efektif, seperti reformasi sosial dan pendidikan. Meskipun tujuan desentralisasi adalah untuk memperkuat demokrasi lokal, ji ka tidak menghasilkan sumber daya keuangan yang memadai, hal itu hanya akan memperburuk keadaan. Demokrasi yang sehat, terutama bila dipadukan dengan pembangunan infrastruktur dan investasi, dapat mengurangi ketimpangan secara signifikan. Oleh karena itu, demokrasi yang efektif membutuhkan kemampuan pemerintahan yang kuat, kebijakan redistribusi, dan sistem pendukung yang stabil untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang inklusif..

Kata Kunci: Demokrasi, Pertumbuhan Ekonomi, Ketimpangan, Kebijakan Redistributif, Desentralisasi

Article history
Received: Desember 2025
Reviewed: Desember 2025
Published: Desember 2025

Plagirism checker no 1496
Doi : prefix doi : 10.8734/musytari.v1i2.359
Copyright : author
Publish by : musytari

This work is licensed under a creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license

MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Manajemen, Ekonomi
Vol. 25 No. 1 Tahun 2025
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

PENDAHULUAN

Kemajuan demokrasi di Indonesia dan negara berkembang lainnya terus terhabat oleh k eterlibatan mereka dalam Pembangunan politik dan ekonomi. Aspek aspek demokrasi di Indon esia, seperti hak politik, kebebasan sipil, dan Lembaga lembaga demokrasi, berdampak pada pertumbuhan ekonomi (Sabardin & Wibowo, 2024). Studi ini menunjukkan bahwa organisasi or ganisasi demokrasi memiliki dampak positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, ya ng menunjukkan bahwa demokrasi substantif, alih alih hanya demokrasi simbolis, dapat mend orong pembangunan lebih lanjut.

Namun, meskipun demokrasi Indonesia semakin meningkat, ketidakstabilan ekonomi masih menjadi masalah serius yang menghambat proses pembangunan. Menurut studi Bariyah (2022), pertumbuhan Partai Demokrasi Indonesia (IDI) tidak selalu berkorelasi dengan penurunan pendapatan ketimpangan di setiap provinsi. Hal ini menunjukkan bahwa demokrasi masih belum cukup untuk menjamin tata kelola ekonomi yang transparan. Selain itu, kebijakan fiscal merupakan alat penting untuk mencegah kesenjangan pendapatan; menurut Yuliani, Paturochman, dan Mubarok (2023), bantuansocial dan Pendidikan dapat mengurangi ketimpangan (kebijakan fiscal sebagai alat redistribusi).

Di tingkat regional, pertumbuhan ekonomi juga dikaji dari perspektif interaksi antara pertumbuhan ekonomi, infrastruktur, dan kualitas demokrasi. Sari, Taher, Ananta, dan Suparta (2025) menganalisis data panel dari provinsi-provinsi di Indonesia dan menemukan bahwa investasi, pertumbuhan ekonomi, infrastruktur jalan, dan demokrasi semuanya memiliki dampak signifikan terhadap perekonomian negara. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas demokrasi di tingkat lokal dan distribusi investasi infrastruktur dapat menjadi krusial dalam mengatasi ketimpangan di masyarakat.

Permasalahan ketimpangan ini rumit ketika diterapkan pada pertumbuhan ekonomi. Meskipun pertumbuhan dapat mengurangi kemiskinan, hal itu tidak selalu menghasilkan distribusi pendapatan yang memadai. Sebagai contoh, Febriyani & Anis (2021) meneliti pengaruh pertumbuhan ekonomi, investasi, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap distribusi pendapatan di Indonesia dan menemukan bahwa terkadang investasi berkaitan dengan peningkatan ketimpangan. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi harus dibarengi dengan kebijakan redistributif agar manfaatnya dapat dirasakan secara transparan.

Memahami hubungan antara demokrasi, pendapatan ketimpangan, dan pertumbuhan ekonomi sangat penting untuk menerapkan kebijakan pembangunan inklusif. Demokrasi yang berkualitas dapat mendorong kebijakan redistribusi dan pengembangan lembaga publik, tetapi hal ini harus diimbangi dengan kebijakan sosial-ekonomi yang pro-keadilan. Oleh karena itu, penelitian mengenai ketiga variabel tersebut tidak hanya relevan secara akademis tetapi juga sangat strategis dalam merumuskan kebijakan, sehingga pembangunan ekonomi tidak hanya bersifat kuantitatif tetapi juga kualitatif.

TELAAH LITERATUR

Perdebatan teoretis tentang hubungan antara demokrasi dan ketimpangan berfokus pada dua poin utama: pertama, demokrasi, melalui mekanisme politik partisipatif dan teori pemilih, cenderung mendorong kebijakan redistributif yang mengurangi ketimpangan; kedua, demokrasi tidak selalu menghasilkan kebijakan redistributif jika lembaga elit atau lemah terus mengejar agenda politik. Penelitian empiris di provinsi-provinsi di Indonesia mengungkapkan berbagai masalah: beberapa studi menunjukkan korelasi negatif antara rasio Gini dan indikator demokrasi, tetapi efeknya tidak konsisten di semua wilayah karena perbedaan kapabilitas dan kebijakan pemerintah daerah (Bariyah, 2022).

Rahmawati, Priyono, dan kolega (2023) dalam Jurnal Perencanaan Wilayah dan Pembangunan meneliti determinan ketimpangan di tingkat provinsi, dan menemukan bahwa pertumbuhan ekonomi dan investasi memang berkontribusi terhadap pendapatan, tetapi

MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Manajemen, Ekonomi
Vol. 25 No. 1 Tahun 2025
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

variabel pendidikan (lama sekolah) dan populasi juga sangat menentukan. Artinya, tanpa intervensi kebijakan sosial-politik (seperti kebijakan pendidikan, akses jaminan sosial), demokrasi saja tidak cukup untuk menjamin pemerataan pendapatan.

Penelitian lain mengkaji aspek krusial dari kualitas demokrasi, yaitu perbedaan antara ukuran lembaga legislatif (parlemen, birokrasi, suprema hukum) dan jumlah sipil, serta kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi. Menurut Purba & Triani (2023), aspek kelembagaan demokrasi mempunyai pengaruh yang lebih konsisten terhadap laju pertumbuhan dibandingkan aspek kebebasan sipil semata; Dengan kata lain, demokrasi yang "berfungsi" lewat institusi lewat efektif lebih berpeluang menciptakan kebijakan iklim yang kondusif bagi pertumbuhan. Hal ini memperkuat argumen bahwa tidak banyak pemilu yang penting; sebaliknya, hal ini menyoroti kualitas lembaga yang mempengaruhi kebijakan ekonomi.

Penelitian lain mengkaji aspek krusial dari kualitas demokrasi, yaitu perbedaan antara ukuran lembaga legislatif (parlemen, birokrasi, suprema hukum) dan jumlah sipil, serta kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi. Menurut Purba & Triani (2023), aspek kelembagaan demokrasi mempunyai pengaruh yang lebih konsisten terhadap laju pertumbuhan dibandingkan aspek kebebasan sipil semata; Dengan kata lain, demokrasi yang "berfungsi" lewat institusi lewat efektif lebih berpeluang menciptakan kebijakan iklim yang kondusif bagi pertumbuhan. Hal ini memperkuat argumen bahwa tidak banyak pemilu yang penting; sebaliknya, hal ini menyoroti kualitas lembaga yang mempengaruhi kebijakan ekonomi.

Kesimpulannya, literatur politik menunjukkan bahwa struktur politik-ekonomi nasional dan konteks sejarah menentukan efektivitas demokrasi sebagai alat pemerintahan. Penelitian-penelitian kajian kebijakan dan observasi empiris (mis. Putri, 2025; studi desentralisasi) menunjukkan bahwa desentralisasi dan reformasi kelembagaan yang berjalan bersama peningkatan partisipasi publik cenderung memperbesar kemungkinan penurunan demokrasi ketimpangan. Namun, jika proses desentralisasi dibarengi dengan lemahnya fiskal daerah, dampaknya mungkin sebaliknya, yakni kesenjangan antar daerah semakin besar. Oleh karena itu, literatur mendorong penerapan kebijakan terpadu: memperkuat lembaga-lembaga demokrasi, meningkatkan kapasitas keuangan, dan menerapkan kebijakan sosial yang menyasar masyarakat rentan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengadopsipendekatan kualitatif untuk menganalis efektivitas demokrasi dalam mengurangi ketimpangan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Dimana metode kualitatif dipilih karena penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu menggunakan bahan-bahan dari buku, ebook, internet, artikel, dan jurnal sebelumnya sebagai sumber utama atau literature review. Penelitian ini berfokus pada subjek utama, yaitu demokrasi dan pertumbuhan ekonomi. Namun, pengumpulan data tidak dilakukan melalui interaksi langsung dengan subjek utama. Data diperoleh melalui sumber-sumber seperti ResearchGate, Google Scholar, dan buku. Sumber-sumber ini termasuk dalam kategori data sekunder, yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung dari subjek penelitian, seperti karya ilmiah, jurnal internasional, media massa, dan media elektronik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambar Umum Kondisi Demokrat dan Ketimpangan

Perkembangan demokrasi di Indonesia dan negara-negara lain merupakan fenomena yang kompleks, terutama jika dibandingkan dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi. Demokrasi, yang seharusnya mampu mendukung pemerintahan kesejahteraan melalui mekanisme representasi politik, tidak selalu membuahkan hasil yang diinginkan. Dalam konteks

MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Manajemen, Ekonomi
Vol. 25 No. 1 Tahun 2025
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

Indonesia, penelitian yang dilakukan oleh Bariyah (2022) di 34 provinsi menunjukkan bahwa peningkatan kualitas demokrasi, yang dicapai melalui Indeks Demokrasi Indonesia (IDI), tidak selalu berbanding lurus dengan penurunan ketimpangan. Di beberapa provinsi, peningkatan IDI berkorelasi dengan Rasio Gini, yang menunjukkan bahwa sistem demokrasi yang beroperasi secara prosedural tidak selalu efektif dalam mengurangi ketimpangan pendapatan.

Dalam konteks global, negara-negara adidaya seperti Amerika Serikat dan Inggris Raya menghadapi tantangan berat, meskipun mereka telah membangun sistem demokrasi. Fenomena yang dikenal sebagai "demokrasi liberal tetapi timpang" menunjukkan bahwa stabilitas demokrasi tidak serta merta menghasilkan stabilitas ekonomi tanpa adanya kebijakan redistributif yang tegas. Hal ini sejalan dengan temuan Yuliani, Paturochman, dan Mubarok (2023), yang menekankan pentingnya instrumen keuangan, terutama dukungan pendidikan dan sosial. Berkat tingkat demokrasinya, negara-negara yang berupaya signifikan untuk memperkuat ikatan sosialnya lebih berhasil dalam menjaga stabilitas.

Sebaliknya, di negara-negara berkembang, demokrasi seringkali berakar dari struktur ekonomi yang sangat dipengaruhi oleh elit yang ada. Menurut Nursahid, Priyagus, dan Mintarti (JIEM), pertumbuhan ekonomi saja berpotensi mengurangi ketimpangan jika kebijakan pemerataan tidak diikuti. Hal ini terlihat di banyak wilayah Indonesia, di mana sektor industri dan investasi sedang berkembang, tetapi sebagai investasi besar, investasi tersebut masih terkonsentrasi pada kelompok tertentu, sehingga distribusi kesejahteraan tidak terlalu jelas. Situasi ini menunjukkan bahwa demokrasi tanpa mekanisme kontrol sosial-ekonomi yang efektif hanya menghasilkan partisipasi politik, alih-alih mengurangi ketimpangan.

Desentralisasi politik sejak reformasi seharusnya memperkuat mekanisme demokrasi bagi masyarakat lokal. Namun, penelitian Aditya (2020) menunjukkan bahwa peningkatan demokrasi lokal melalui desentralisasi tidak selalu mencegah penurunan ketimpangan jika pemerintah daerah memiliki sumber daya keuangan yang memadai. Dalam beberapa kasus, desentralisasi justru meningkatkan kesenjangan antardaerah karena daerah kaya dapat mengoptimalkan PAD (Pendapatan Asli Daerah) lebih efektif daripada daerah miskin. Akibatnya, variabel kelembagaan seperti kapasitas keuangan, kualitas pelayanan, dan integritas politik menjadi faktor yang membedakan antara demokrasi yang efektif dan demokrasi prosedural semata.

Ketimpangan juga dipengaruhi oleh kualitas sumber daya manusia. Menurut penelitian Rahmawati, Priyono, dan Lestari (2023), pendidikan dan administrasi sekolah berperan penting dalam mencegah pendapatan ketimpangan. Negara-negara maju, seperti Korea dan Jepang, telah menunjukkan bahwa demokrasi yang dikombinasikan dengan investasi yang signifikan dalam pendidikan dapat mengurangi disparitas pendidikan di tingkat yang lebih rendah. Dalam konteks Indonesia, kemajuan pendidikan lebih pesat di beberapa wilayah, yang mengakibatkan penurunan standar SDM di antara penduduk setempat. Ketimpangan pendidikan seringkali mengakibatkan ketimpangan upah, yang mengurangi efektivitas demokrasi dalam menciptakan kesempatan.

Selain itu, peningkatan ketimpangan global seringkali dikaitkan dengan perubahan struktur ekonomi dunia, seperti digitalisasi, otomatisasi, dan transformasi tempat kerja. Banyak negara demokrasi tidak mampu merespons tantangan-tantangan baru ini dengan cepat. Meskipun demokrasi menyediakan forum bagi wacana publik, proses pembuatan undang-undang seringkali sulit, sehingga membuat masyarakat yang kurang memiliki akses dan kemahiran dalam teknologi digital menjadi lebih rentan. Situasi ini sejalan dengan temuan Nursahid dkk., yang menyatakan bahwa perubahan ekonomi struktural tanpa kebijakan adaptif akan mengurangi pendapatan dalam jangka panjang.

Dengan demikian, kondisi umum demokrasi dan ketimpangan menunjukkan bahwa hubungan antara keduanya kompleks dan sangat bergantung pada kualitas kelembagaan,

MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Manajemen, Ekonomi
Vol. 25 No. 1 Tahun 2025
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

kebijakan fiskal, capaian pendidikan, dan struktur ekonomi nasional. Demokrasi yang berfungsi dengan baik tidak hanya harus memastikan bahwa politisi dan pemilih kooperatif, tetapi juga didukung oleh kebijakan redistributif, sistem pendidikan yang berfungsi dengan baik, dan pemerintahan yang stabil. Karena struktur pendukung yang disebutkan di atas lemah, demokrasi seringkali tidak cukup untuk menjaga stabilitas ekonomi; bahkan, dalam situasi tertentu, justru mungkin mampu melakukannya.

Efektivitas Demokrasi dalam Mengurangi Ketimpangan

Perkembangan demokrasi di Indonesia dan negara-negara lain merupakan fenomena yang kompleks, terutama jika dibandingkan dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi. Demokrasi, yang seharusnya mampu mendukung pemerintahan kesejahteraan melalui mekanisme representasi politik, tidak selalu membuahkan hasil yang diinginkan. Dalam konteks Indonesia, penelitian yang dilakukan oleh Bariyah (2022) di 34 provinsi menunjukkan bahwa peningkatan kualitas demokrasi, yang dicapai melalui Indeks Demokrasi Indonesia (IDI), tidak selalu berbanding lurus dengan penurunan ketimpangan. Di beberapa provinsi, peningkatan IDI berkorelasi dengan Rasio Gini, yang menunjukkan bahwa sistem demokrasi yang beroperasi secara prosedural tidak selalu efektif dalam mengurangi ketimpangan pendapatan.

Dalam konteks global, negara-negara adidaya seperti Amerika Serikat dan Inggris Raya menghadapi tantangan berat, meskipun mereka telah membangun sistem demokrasi. Fenomena yang dikenal sebagai "demokrasi liberal tetapi timpang" menunjukkan bahwa stabilitas demokrasi tidak serta merta menghasilkan stabilitas ekonomi tanpa adanya kebijakan redistributif yang tegas. Hal ini sejalan dengan temuan Yuliani, Paturochman, dan Mubarok (2023), yang menekankan pentingnya instrumen keuangan, terutama dukungan pendidikan dan sosial. Berkat tingkat demokrasinya, negara-negara yang berupaya signifikan untuk memperkuat ikatan sosialnya lebih berhasil dalam menjaga stabilitas.

Sebaliknya, di negara-negara berkembang, demokrasi seringkali berakar dari struktur ekonomi yang sangat dipengaruhi oleh elit yang ada. Menurut Nursahid, Priyagus, dan Mintarti (JIEM), pertumbuhan ekonomi saja berpotensi mengurangi ketimpangan jika kebijakan pemerataan tidak diikuti. Hal ini terlihat di banyak wilayah Indonesia, di mana sektor industri dan investasi sedang berkembang, tetapi sebagai investasi besar, investasi tersebut masih terkonsentrasi pada kelompok tertentu, sehingga distribusi kesejahteraan tidak terlalu jelas. Situasi ini menunjukkan bahwa demokrasi tanpa mekanisme kontrol sosial-ekonomi yang efektif hanya menghasilkan partisipasi politik, alih-alih mengurangi ketimpangan.

Desentralisasi politik sejak reformasi seharusnya memperkuat mekanisme demokrasi bagi masyarakat lokal. Namun, penelitian Aditya (2020) menunjukkan bahwa peningkatan demokrasi lokal melalui desentralisasi tidak selalu mencegah penurunan ketimpangan jika pemerintah daerah memiliki sumber daya keuangan yang memadai. Dalam beberapa kasus, desentralisasi justru meningkatkan kesenjangan antardaerah karena daerah kaya dapat mengoptimalkan PAD (Pendapatan Asli Daerah) lebih efektif daripada daerah miskin. Akibatnya, variabel kelembagaan seperti kapasitas keuangan, kualitas pelayanan, dan integritas politik menjadi faktor yang membedakan antara demokrasi yang efektif dan demokrasi prosedural semata.

Ketimpangan juga dipengaruhi oleh kualitas sumber daya manusia. Menurut penelitian Rahmawati, Priyono, dan Lestari (2023), pendidikan dan administrasi sekolah berperan penting dalam mencegah pendapatan ketimpangan. Negara-negara maju, seperti Korea dan Jepang, telah menunjukkan bahwa demokrasi yang dikombinasikan dengan investasi yang signifikan dalam pendidikan dapat mengurangi disparitas pendidikan di tingkat yang lebih rendah. Dalam

MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Manajemen, Ekonomi
Vol. 25 No. 1 Tahun 2025
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

konteks Indonesia, kemajuan pendidikan lebih pesat di beberapa wilayah, yang mengakibatkan penurunan standar SDM di antara penduduk setempat. Ketimpangan pendidikan seringkali mengakibatkan ketimpangan upah, yang mengurangi efektivitas demokrasi dalam menciptakan kesempatan.

Selain itu, peningkatan ketimpangan global seringkali dikaitkan dengan perubahan struktur ekonomi dunia, seperti digitalisasi, otomatisasi, dan transformasi tempat kerja. Banyak negara demokrasi tidak mampu merespons tantangan-tantangan baru ini dengan cepat. Meskipun demokrasi menyediakan forum bagi wacana publik, proses pembuatan undang-undang seringkali sulit, sehingga membuat masyarakat yang kurang memiliki akses dan kemahiran dalam teknologi digital menjadi lebih rentan. Situasi ini sejalan dengan temuan Nursahid dkk., yang menyatakan bahwa perubahan ekonomi struktural tanpa kebijakan adaptif akan mengurangi pendapatan dalam jangka panjang.

Dengan demikian, kondisi umum demokrasi dan ketimpangan menunjukkan bahwa hubungan antara keduanya kompleks dan sangat bergantung pada kualitas kelembagaan, kebijakan fiskal, capaian pendidikan, dan struktur ekonomi nasional. Demokrasi yang berfungsi dengan baik tidak hanya harus memastikan bahwa politisi dan pemilih kooperatif, tetapi juga didukung oleh kebijakan redistributif, sistem pendidikan yang berfungsi dengan baik, dan pemerintahan yang stabil. Karena struktur pendukung yang disebutkan di atas lemah, demokrasi seringkali tidak cukup untuk menjaga stabilitas ekonomi; bahkan, dalam situasi tertentu, justru mungkin mampu melakukannya.

Salah satu contoh empiris efektivitas demokrasi dalam mencegah ketimpangan adalah hasil studi Bariyah (2022) yang diterbitkan dalam Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi. Studi ini mengevaluasi dampak Demokrasi Indonesia (IDI) terhadap rasio Gini di 34 provinsi antara tahun 2009 dan 2019, dengan mempertimbangkan lembaga politik, sosial, dan demokrasi negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di beberapa provinsi (19 dari 34 provinsi), IDI berkaitan dengan penurunan Rasio Gini, sementara di provinsi lain, hubungan ini hanya positif. Bariyah menegaskan bahwa kualitas demokrasi sudah tidak memadai dan mekanisme redistribusi yang efektif diperlukan agar demokrasi dapat mendukung pemerataan pendapatan.

Selain itu, desentralisasi keuangan yang dijalankan bersamaan dengan demokrasi lokal merupakan faktor krusial dalam mengurangi ketimpangan. Dalam sebuah studi, Aditya (2020) mengkaji bagaimana desentralisasi keuangan dan IDI daerah memengaruhi Rasio Gini daerah. Temuan studi menunjukkan bahwa meskipun desentralisasi fiskal diharapkan dapat meningkatkan kinerja pemerintahan, praktik pengelolaan keuangan daerah belum ideal; di sisi lain, IDI daerah justru berdampak positif terhadap ketimpangan di beberapa daerah. Hal ini menunjukkan bahwa demokrasi lokal tanpa sumber daya keuangan yang memadai dan pengelolaan uang publik dapat menjadi alat yang efektif untuk redistribusi.

Sari, Taher, Ananta, & Suparta (2025) menerbitkan sebuah studi di Jurnal Elektronik Bidang Ekonomi, Bisnis, dan Kewirausahaan yang menyoroti pentingnya demokrasi dalam mengurangi ketimpangan daerah. Mereka meneliti 34 provinsi antara tahun 2018 dan 2023 dan menemukan bahwa variabel demokrasi (potensi yang diturunkan dari IDI atau indikator lokal) memiliki dampak negatif yang signifikan terhadap perekonomian negara ketika dikombinasikan dengan investasi dan infrastruktur. Hal ini menunjukkan bahwa demokrasi yang sehat dapat mengurangi disparitas antarnegara jika investasi dan pembangunan infrastruktur diprioritaskan.

Lebih lanjut, kebijakan fiskal nasional juga memegang peran krusial dalam efektivitas demokrasi untuk mengurangi ketimpangan. Menurut Yuliani, Paturochman, dan Mubarok (2023) dalam Jurnal Bina Bangsa Ekonomika, pengeluaran sosial dan pendidikan berdampak negatif terhadap pendapatan ketimpangan Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa demokrasi belumlah

MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Manajemen, Ekonomi
Vol. 25 No. 1 Tahun 2025
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

sempurna; kebijakan redistribusi yang diterapkan pemerintah melalui instrumen fiskal sangat diperlukan agar demokrasi dapat berhasil secara ekonomi.

Pengaruh Demokrasi terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Namun, efektivitas demokrasi dalam meredam kesenjangan tidak selalu spontan dan bukan merupakan akibat dari hambatan struktural. Sebagai contoh, Santoso & Mukhlis (2021) (dalam jurnal Ketimpangan Ekonomi Wilayah) mencatat bahwa meskipun demokrasi memiliki keunggulan, faktor struktural seperti desentralisasi fiskal, kualitas administrasi daerah, dan kapasitas fiskal merupakan indikator penting apakah demokrasi dapat secara efektif berfungsi sebagai alat redistribusi. Tanpa meningkatkan aspek-aspek ini, demokrasi cenderung mandek dalam kemampuannya untuk mengurangi kesenjangan pendapatan secara mendasar.

Demokrasi seringkali dipandang sebagai fondasi yang menopang stabilitas politik, yang selanjutnya berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Stabilitas politik ini memberikan ketenangan pikiran bagi investor, meningkatkan kepercayaan investor, dan menciptakan ruang bagi pemerintah untuk menerapkan kebijakan jangka panjang. Menurut analisis Ramadhan (2023) terhadap negara-negara ASEAN, termasuk Indonesia, demokrasi berkontribusi pada pengembangan lingkungan politik dan investasi yang lebih stabil, yang berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi Jangka Panjang.

Selain stabilitas politik, demokrasi juga mendorong transparansi dan akuntabilitas pemerintah. Kedua faktor ini berdampak langsung pada efisiensi belanja publik dan daya sumber alokasi. Menurut Bariyah (2022), peningkatan kualitas demokrasi Indonesia—terutama melalui perbaikan mekanisme representasi publik dan kebebasan—meningkatkan efektivitas kebijakan pembangunan, sehingga meningkatkan persepsi aktivitas ekonomi di berbagai wilayah. Dalam konteks ini, demokrasi bukan hanya alat politik tetapi juga alat ekonomi yang memaksimalkan fungsi pemerintahan.

Demokrasi berkualitas tinggi juga berkaitan dengan peningkatan partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan. Melalui proses musyawarah dan pelibatan masyarakat, kebijakan publik menjadi lebih responsif terhadap kebutuhan ekonomi masyarakat. Menurut penelitian Priscilla, Rindayati, dan Anggraeni (2024), kinerja provinsi yang demokratis di Indonesia berdampak positif pada pertumbuhan inklusif, yang merupakan salah satu bentuk pertumbuhan ekonomi yang stabil. Hal ini menunjukkan bahwa demokrasi dapat meningkatkan kualitas pembangunan ekonomi melalui kebijakan berbasis partai.

Dari perspektif pembangunan daerah, demokrasi memfasilitasi desentralisasi yang lebih efektif, sehingga memungkinkan implementasi strategi pembangunan sesuai dengan kebutuhan daerah. Menurut studi Putra dan Mukhlis (2021), desentralisasi fiskal yang terjadi dalam konteks demokrasi di Indonesia meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola proyek konstruksi, yang pada gilirannya mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Demokrasi menyediakan mekanisme kontrol publik yang memfasilitasi penggunaan anggaran, sehingga dana konstruksi dapat digunakan secara lebih efektif dan produktif.

Namun, hubungan antara demokrasi dan pertumbuhan ekonomi tidak selalu linear. Dalam situasi tertentu, proses demokrasi justru mengarah pada ketidakpastian politik, terutama ketika terdapat elit politik atau konflik antarlembaga. Menurut Aditya (2020), variasi kualitas demokrasi antardaerah menyebabkan penurunan efektivitas kebijakan ekonomi. Akibatnya, meskipun demokrasi didasarkan pada gagasan bahwa pertumbuhan ekonomi didorong, hasilnya pada akhirnya mengarah pada beberapa lembaga politik yang menjalankan fungsi pemerintahan.

MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Manajemen, Ekonomi
Vol. 25 No. 1 Tahun 2025
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

Terakhir, demokrasi juga berkontribusi pada pembangunan ekonomi dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Demokrasi menyediakan ruang bagi kebijakan-kebijakan terkait pendidikan, kesehatan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat umum, yang semuanya berfungsi sebagai fondasi bagi perluasan panjang. Dalam analisis mereka, Sari dkk. (2025) menyimpulkan bahwa demokrasi yang baik mendorong pemerintah untuk meningkatkan infrastruktur sosial dan ekonomi karena opini publik yang lebih kritis dan tangguh. Pada akhirnya, infrastruktur yang lebih baik meningkatkan aktivitas ekonomi dan mendorong pertumbuhan nasional.

SIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Hubungan antara efektivitas demokrasi, pendapatan ketimpangan, dan pertumbuhan ekonomi bersifat kompleks, tidak selalu linear, dan sangat bergantung pada kualitas pemerintahan dan implementasi kebijakan pendukungnya. Secara positif, demokrasi memberikan fondasi bagi stabilitas politik, transparansi, dan akuntabilitas pemerintah, yang semuanya berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi jangka panjang melalui peningkatan kepercayaan investor dan efisiensi belanja publik. Namun, penelitian empiris di Indonesia menunjukkan bahwa peningkatan kualitas demokrasi, yang diukur dengan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI), tidak selalu sejalan dengan penurunan pendapatan ketimpangan (Rasio Gini) di setiap provinsi. Hal ini menunjukkan bahwa demokrasi yang beroperasi secara prosedural tidak cukup untuk mencapai kesejahteraan ekonomi. Efektivitas demokrasi dalam mengurangi ketimpangan sangat bermanfaat bagi kebijakan redistributif yang tegas, seperti kebijakan sosial dan pendidikan, serta kapasitas keuangan dan administratif yang tinggi. Hal ini karena desentralisasi tanpa sumber daya yang memadai justru berpotensi meningkatkan kesenjangan antardaerah.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan ini, terdapat beberapa pendekatan strategis untuk meningkatkan efektivitas demokrasi dalam mencapai pembangunan ekonomi inklusif. Pertama dan terpenting, penguatan kebijakan redistributif harus menjadi prioritas utama dengan memberikan kontribusi signifikan terhadap program-program pro-masyarakat miskin, seperti bantuan sosial dan pendidikan, sebagai instrumen keuangan utama untuk secara efektif mengurangi kesenjangan pendapatan. Kedua, penting untuk meningkatkan kualitas kelembagaan dan kapasitas daerah; hal ini memastikan bahwa desentralisasi fiskal diimbangi dengan peningkatan kapasitas keuangan dan integritas politik daerah untuk mencegah kesenjangan antardaerah. Terakhir, penekanan harus diberikan pada kualitas sumber daya manusia (SDM), di mana demokrasi harus digunakan untuk mendorong investasi besar dalam pendidikan dan infrastruktur sosial-ekonomi guna mengurangi kesenjangan pendidikan dan menyediakan kesempatan ekonomi yang lebih adil bagi masyarakat umum.

REFERENSI

Aditya, S. E. (2020). “Analisis Pengaruh Desentralisasi Fiskal terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan di Indonesia.”

Aditya, S. E. (2020). Analisis Pengaruh Desentralisasi Fiskal terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan di Indonesia. Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB. https://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/6568

Aditya, S. E. (2020). Analisis Pengaruh Desentralisasi Fiskal terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan di Indonesia. Jurnal Ilmiah FEB. https://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/6568

Bariyah, N. (2022). “Demokrasi dan Ketimpangan Pendapatan di Indonesia.”

Bariyah, N. (2022). Demokrasi dan ketimpangan pendapatan di Indonesia. Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi, 21(2), 53–64.
Bariyah, N. (2022). Demokrasi dan ketimpangan pendapatan di Indonesia. Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi, 21(2), 53–64. (PDF)
https://journal.unj.ac.id/unj/index.php/jmb/article/view/23071.

Bariyah, N. (2022). Demokrasi dan Ketimpangan Pendapatan di Indonesia. Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi, 21(2), 53–64.
https://journal.unj.ac.id/unj/index.php/jmb/article/view/23071

Bariyah, N. (2022). Demokrasi dan Ketimpangan Pendapatan di Indonesia. Jurnal Mimbar Demokrasi. https://journal.unj.ac.id/unj/index.php/jmb/article/view/23071

Febriyani, A., & Anis, A. (2021). Pengaruh pertumbuhan ekonomi, investasi, dan Indeks Pembangunan Manusia terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di Indonesia. Jurnal Kajian Ekonomi dan Pembangunan.

Novanto, F. S. P., & Prabowo, P. S. (2024). Pengaruh Perkembangan Demokrasi dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. Independent: Jurnal Pendidikan dan Kebijakan.
https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/independent/article/view/58941.

Nursahid, E., Priyagus, P., & Mintarti, S. (2018). “Analisis Faktor yang Mempengaruhi Ketimpangan Pendapatan di Indonesia.”

Priscilla, H., Rindayati, W., & Anggraeni, L. (2024). Kinerja Demokrasi dan Pertumbuhan Inklusif. Repository IPB. https://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/137000

Purba, S. F., & Triani, M. (2023). Relasi Bauran Aspek Demokrasi dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. Politika: Jurnal Ilmu Politik.
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/politika/article/view/54967.

Putra, F. & Mukhlis, I. (2021). Desentralisasi Fiskal dan Ketimpangan Ekonomi. Jurnal Ekonomi, Bisnis, dan Pendidikan. https://journal3.um.ac.id/index.php/fe/article/view/629

Putri, D. F. (2023). Problematika ketimpangan ekonomi dalam sistem ekonomi Indonesia. Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Manajemen.
https://ejurnal.kampusakademik.co.id/index.php/jiem/article/view/330.

Putri, R. (2025). Demokrasi dalam Krisis Partisipasi: Perlukah Membangun ... (penelitian/kajian). Jurnal INA/Proceedings.
https://jurnal.asian.or.id/index.php/JIANA/article/download/292/113

Rahmawati, E. D., Priyono, T. H., & Lestari, E. K. (2023). “Analisis Determinan Ketimpangan Pendapatan di Indonesia.”

Rahmawati, E. D., Priyono, T. H., & Lestari, E. K. (2023). Analisis Determinan Ketimpangan Pendapatan di ndonesia. Jurnal Perencanaan Wilayah dan pembangunan, 2(1).
DOI:10.19184/jpwp.v2i1.46091.

Ramadhan, Z. (2023). Demokrasi dan Ketimpangan di ASEAN. Diponegoro Journal of Economics.
https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jme/article/view/36929

MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Manajemen, Ekonomi
Vol. 25 No. 1 Tahun 2025
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

Sabardin & Wibowo, M. G. (2024). Pengaruh aspek-aspek demokrasi Indonesia terhadap pertumbuhan ekonomi (2016–2020). Jurnal Magister Ekonomi Syariah.

Sari, D., Taher, A. R. Y., Ananta, P., & Suparta, I. W. (2025). Ketimpangan ekonomi wilayah di Indonesia: perspektif analitis pengaruh ekonomi, infrastruktur, dan demokrasi. EFEBE – E-Journal Field of Economics, Business and Entrepreneurship.

Sari, D., Taher, A. R. Y., Ananta, P., & Suparta, I. W. (2025). Ketimpangan Ekonomi Wilayah di Indonesia: Perspektif Analitis Pengaruh Ekonomi, Infrastruktur, dan Demokrasi. E-Journal Field of Economics, Business and Entrepreneurship, 3(2), 430–442. https://doi.org/10.23960/efebe.v3i2.251

Sari, D., Taher, A., Ananta, P., & Suparta, I. (2025). Ketimpangan dan Faktor Demokrasi dalam Pembangunan Wilayah. EFEBE. https://efebe.feb.unila.ac.id/index.php/efebe/article/view/251

Yuliani, N. M., Paturochman, I. R., & Mubarok, A. T. (2023). “Kebijakan Fiskal dalam Mengatasi Ketimpangan Pendapatan di Indonesia.”

Yuliani, N. M., Paturochman, I. R., & Mubarok, A. T. (2023). Kebijakan fiskal dalam mengatasi ketimpangan pendapatan di Indonesia. Jurnal Bina Bangsa Ekonomika.

Yuliani, N. M., Paturochman, I. R., & Mubarok, A. T. (2023). Kebijakan Fiskal dalam Mengatasi Ketimpangan Pendapatan di Indonesia. Jurnal Bina Bangsa Ekonomika, 18(1), https://doi.org/10.46306/jbbe.v18i1.678

Zainuddin, Z., & Makmur, T. (2024). Dampak pertumbuhan ekonomi yang dimediasi indeks demokrasi terhadap kemiskinan di Aceh. Jurnal Ilmiah Edunomika. https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jie/article/view/13288.